

Arief Yuwono, dkk.

# KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Kata Pengantar: **PROF. DR. EMIL SALIM**



Cepat atau lambat kita harus menyadari bahwa bumi juga perlu hidup tanpa polusi. Yang harus dipahami umat manusia adalah tidak bisa hidup tanpa bumi, tapi planet ini bisa hidup tanpa manusia.  
- Evo Morales

**Keberlanjutan Lingkungan**

1016003097

© 2016 - PT Kanisius

**Penerbit PT Kanisius (Anggota IKAPI)**

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Kotak Pos 1125/Yk, Yogyakarta 55011, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.com

Website : www.kanisiusmedia.com

Cetakan ke-	3	2	1
Tahun	18	17	16

3Editor : Arief Yuwono, Yustinus Ade Stirman, Rosa Delima

Desain isi : Oktavianus

Sampul : Joko Sutrisno

ISBN 978-979-21-5095-7

**Hak cipta dilindungi undang-undang**

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

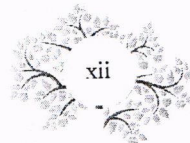
Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Prakata Penyunting .....	ix
Daftar Isi .....	xi
BAB I   KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN .....	1
Mimpi Indonesia 2045 .....	2
Energi Baru dan Terbarukan dalam Perspektif Ketahanan Iklim .....	8
Pengendalian Dampak Lingkungan: Antara Pendekatan Sistemik Dan Penerapan Program .....	13
Idaman Kota Ekologis Abad Xxi .....	24
2050, Indonesia <i>Green State</i> ? .....	33
Tiga Pilar Demokrasi Lingkungan .....	40
Menyongsong Transportasi Humanis Dan Berkelanjutan .....	55
Adipura Menuju Indonesia Lestari .....	62
Membangun Transportasi Ramah Lingkungan Tidak Sekadar Komitmen .....	67
<i>Quo Vadis</i> Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan .....	71
BAB II   JAWA DARURAT KRISIS LINGKUNGAN .....	93
Telegram Darurat Untuk Jawa .....	94
Jalan Makan Lahan .....	97

	Jawa Dalam Lipatan Kezaliman Tata Ruang .....	102
	Tol Trans Jawa: Sejahtera Atau Sangsarakan Rakyat? .....	105
	Trans-Jawa Sebagai Anomali? .....	109
	Dimensi Sosial Dan Lingkungan Jalan Tol Trans-Jawa .....	115
	Tol Semarang—Solo Dinikmati Siapa? .....	119
	Tol Semarang—Solo Demi Gengsi? .....	124
	Jalan Tol Di Jawa Tengah, Untuk Kepentingan Siapa? .....	128
<b>BAB III</b>	<b>MENCEGAH ARMAGEDON DI JAWA</b> .....	135
	Menuju Sustainabilitas Jawa 2025 .....	136
	Mencegah Jawa ‘Tenggelam’ .....	142
	Sistem Urban Di Jawa .....	146
	Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup .....	157
	<i>Tales Of Two Cities</i> .....	162
	Legasi Sebuah Kota .....	167
<b>BAB IV</b>	<b>MENGUATKAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN</b> ..	173
	Menguatkan Kelembagaan Lingkungan .....	174
	Integrasi KLHK, Mau Apa? .....	178
	Tantangan Lingkungan Kabinet Tri Sakti .....	186
	KLH 2014-2019, Antara Diskusi dan Eksekusi .....	192
	Setahun Perjalanan Klhk .....	199
	Penggabungan, Mau Apa? .....	203
	Sinergi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Untuk Kesejahteraan Rakyat .....	211
<b>BAB V</b>	<b>MENAJAMKAN POLITIK LINGKUNGAN</b> .....	217
	Lingkungan, Politik, dan Partai Politik .....	218
	Pemilu, Perubahan Iklim, dan Pemimpin Pro Lingkungan .....	224
	Dicari: Pemimpin Pemberkelanjutan Berwawasan Lingkungan .....	229
	Dicari: Pendekar Lingkunga.....	233
	Pemilu 2014: Mencari Sang Promotor .....	238



Mencari Pemimpin Yang Berwatak Pro Lingkungan .....	249
Dicari Menteri Lingkungan Hidup yang Berkarakter .....	260
<b>BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI MASA</b>	
DEPAN BANGSA.....	265
Obat—Makanan Dari Tanah Air .....	266
Urban Biodiversity Dan Keberadaban .....	270
Dari Keanekaragaman Hayati Menuju Keseragaman Hayati? .....	275
Yahukimo.....	280
Kota Papua Dan Kelestarian Hayatinya .....	284
Bumi Papua, Aku Datang .....	290
Otonomi Papua Bukan Untuk Nestapa .....	295
Papua Paradoks .....	301
Te Aro Neweak Lamo.....	306
Fungsi Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pada Era Otonomi Daerah.....	312
SENTUHAN AKHIR.....	329
Dosa Lingkungan Siapa? .....	330
GLOSARIUM .....	336
BIOGRAFI PENULIS.....	367

## PEMILU 2014: MENCARI SANG PROMOTOR

(Majalah JENDELA Edisi 26 Tahun 2014)

*Oleh: Suparto Wijoyo*

### Apa yang Terjadi?

Saya ingin mengajakmu bertadarus akademik sambil *bertawaf* menyusuri jalan Tuhan mengenai lingkungan dunia. Publik internasional acapkali menyelenggarakan konferensi perubahan iklim, misalnya untuk menghasilkan peneguhan komitmen pengurangan gas rumah kaca. Ya ... kata gas rumah kaca alias GRK sedemikian populer dan menggema tanpa ujung keseriusan yang maton. Akhirnya, saya sendiri suka membandingkan meski tidak layak dibandingkan, dengan santai membaca saja novel inspiratif kritis, karya Pramudya Anantatoer *Rumah Kaca*.

Pembaca pasti mengetahui tentang peristiwa yang begitu mengemparkan manusia seantero jagat. Pemanasan global dalam dimensi sejarah peradaban saya pahami sebagai produk dari revolusi industri yang hasil dinamikanya berupa *climate change*. Meskipun proyeksi masa depan tentang pemanasan global dan perubahan iklim selalu diliputi dua macam ketidakpastian, yakni: ketidakpastian ilmiah dan ketidakpastian yang timbul dari kenyataan bahwa masa depan dapat dikendalikan sampai batas tertentu. Begitu kata para ilmuwan dunia.

J  
ketidal  
dan p  
pengar  
perges  
disikap  
di mar  
yang k  
:  
emisi  
Semua  
*The W*  
indust  
miliar  
emisi  
ton da  
merup  
miliar  
3% da  
emisi  
dunia.  
Mauk  
mengh  
dalam  
munaf  
  
manu  
meng  
GRK  
"kons  
memb  
indust  
merup  
dapat

Perspektif demikian tetap mengumandangkan bahwa fenomena ketidakpastian sepiantasnya semakin mendorong semua akademikus dan politikus meningkatkan landasan keilmuan dalam mekanisme pengambilan keputusan politik. Secara faktual, cukup satu kata bahwa pergeseran musim akibat perubahan iklim adalah realitas yang mesti disikapi. Bukankah Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Bandung, Malang atau di mana pun kota-kota bersemi, kian hari kian panas dengan kadar hujan yang kian mengecil, meski akibat banjir dahsyat.

Semua orang tahu dan mereka yang membicarakan jual beli emisi juga sudah mengetahuinya. Kini, musim sedang campur-aduk. Semua sepakat, ini akibat pemanasan global yang bermuara pada GRK. *The World Resources Institute* (WRI) melaporkan bahwa negara-negara industri menghasilkan lebih dari 60% emisi CO<sub>2</sub> dari jumlah 254, 8 miliar ton dalam periode 1900-1999. Amerika Serikat mengeluarkan emisi CO<sub>2</sub> tertinggi di dunia, yaitu 30, 3% atau sebesar 77, 3 miliar ton dari total emisi CO<sub>2</sub> yang dikeluarkan seluruh dunia. Rusia juga merupakan penyumbang emisi CO<sub>2</sub> kedua terbesar dunia, yaitu 22, 7 miliar ton atau setara 8, 9%; dan disusul Jerman 18, 6 miliar ton atau 7, 3% dari jumlah seluruhnya. Jepang menduduki tempat keenam dengan emisi CO<sub>2</sub> sebesar 9, 4 miliar ton atau 3, 7% dari total pengeluaran CO<sub>2</sub> dunia. Istilah sekarang ya "kita diminta memikul dosa negara maju." Maukah mereka mereduksi secara bermakna GKR-nya? Maukah mereka menghentikan industrinya dalam waktu yang secara periodik terukur dalam pengurangan GRK? Apabila tidak mau itu tandanya mereka munafik, bukan?

Pada ujung cerita, pastilah kembali ke manusia. Sebagian besar manusia sekarang ini dalam dimensi teologi lingkungan, saya istilahkan mengalami "kekafiran ekologis." Dalam dimensi ini pengurangan GRK adalah pilihan. Pengurangan tersebut memerlukan perubahan "konsumsi" secara radikal. Emisi CO<sub>2</sub>, misalnya yang harus turun 60% membutuhkan pengurangan bahan bakar fosil untuk transportasi, industri, maupun listrik pada tingkat global sampai setengahnya. Ini merupakan pertarungan melawan pemanasan global dan dunia harus dapat dimobilisir untuk bertindak.

## Di Mana Posisi Indonesia?

Mari mencermatinya. Dalam sejarah-ekologisnya, tata alam Indonesia justru menjadi "pabrik oksigen" dengan luasan hutan ratusan juta hektar dengan tragedi kebakaran sebagai insiden tahunan menyumbang "emisi". Tetap saja secara tematik negara-negara maju sebagai "pabrik emisi" dan Indonesia adalah "pabrik oksigen" sehingga dunia seharusnya berterima kasih kepada Indonesia. Negara-negara maju ibaratnya sedang berpestapora dengan emisinya serta memanen perilakunya, sementara kita diminta mencuci piring dan menanggung akibatnya. Dalam bahasa paling vulgar, bahwa negara-negara maju itu telah dan sedang "berak emisi" dan kita diminta mencebokinya. Tindakan macam apa itu? Adilkah itu? Pantas dan patutkah itu? Logiskah itu? Bukankah Indonesia yang "khalifah ekologis" itu?

Paradigma yang seyogianya dikristalisasi di forum manapun adalah *kujaga hutanku dan kurangi emisimu*. Inilah langkah strategis kompromi di latar kebersamaan itu. Kini banyak pemerintah daerah di Indonesia mengemban amanat hebat untuk banyak menanam pohon dan melindungi pepohonan. Di Jawa Timur, ada Perda tentang Rehabilitasi Lahan Kritis atau di Kota Surabaya ada regulasi mengenai pemeliharaan pepohonan. Ini tentu kecil dalam skala global, tetapi dahsyat untuk pengembangan ke depan yang berangkat dari kesadaran lokal.

## Antara *Kimpling* dan *Mbeling*

Tahun kian bertambah dan kita mesti merapatkan barisan dan menyatukan langkah. Semua insan dapat menjadi promotor lingkungan. Kepala negara, menteri, ilmuwan, LSM, jurnalis, dan banyak *stakeholders* untuk membahas secara khusus dan bertindak istimewa bagi penyelamatan lingkungan, apalagi dalam tahun politik dewasa ini. Hiruk-pikuk perpolitikan sudah dimulai. Bahkan, sepanjang hari ada pemilu termasuk pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah. Genderang pemilu semakin bergenta-genta untuk menyentak riuh publik. Pemilihan calon anggota legislatif yang acapkali disingkat *caleg*,



telah mewarnai ruang-ruang komunitas dalam skala yang menggairahkan meski semakin meresahkan.

Kesumpekan masyarakat dengan beragam kebutuhan hidup yang tidak terjangkau, bertambah berat dengan beban batin melihat banyak baliho dan poster-poter partai yang semrawut. Para caleg dengan *enteng* memamerkan dan memajang diri dengan kisaran yang bagaikan air bah mengenang banjir bandang ala Nabi Nuh. Kita dikepung banjir poster dan baliho. Republik ini sedemikian dahsyatnya, menderita gulungan karton dan berbal-bal kain sablonan dari Sabang sampai Merauke. Dari Barat ke Timur berjajar-jajar lambang partai dan gambar caleg. Wajah-wajah mereka menghiasi atau meramaikan panggung perkotaan maupun perdesaan untuk tidak mengatakan menambah beban sampah lingkungan. Tidak ada celah geografis di seluruh nusantara yang luput dari pajangan gambar partai dengan calegnya. Inilah saatnya para pendekar partai dengan segala *punokawannya* menjadi peminta-minta untuk mendapatkan recehan suara rakyat.

Ya ... kali ini biarkanlah rakyat menentukan pilihannya sebagai *juragan* dan para caleg meminta-minta dukungan dengan cara apa pun dan di mana pun tanpa angpau atau sedekah. Inilah demokrasi itu. Ada pemberi dan ada peminta. Hukum ekonomi bukan? Para caleg yang mampu tampil cantik dan ganteng dalam gambar berwarna yang *non-sketsatis* seyogianya memang tampil elegan dengan beragam visi-misi yang diusungnya. Para caleg mesti dapat tampil perfeksionis dengan ekspektasi yang menjanjikan. Dalam bahasa tertentu para caleg harus terlihat *berbudi luhur, bowo leksono* yang anggun dengan kilatan kerling mata yang menandakan bahwa harapan masa depan akan lebih baik dengan memilihnya. Oleh sebab itu, tulisan yang menonjol adalah "Mohon Doa Restu dan Dukungannya." Para caleg telah memohon dan rakyat jualah yang akan mengabdikan atau tidak.

Ok ... caleg memang harus *kinclong* dalam berpenampilan maupun berujar warta. Caleg mesti mampu memberikan perhatian serta dapat menarik simpatik calon para pemilih. Janji adalah sebuah pertanda bahwa ada tekad serta semangat yang harus diberikan kepada para calon pemilih. Mereka harus menyediakan hak tawar untuk dipilih dan

memberi kontribusi spirit untuk dipilih dengan kalkulasi terbaiknya. Para caleg sudah sepatutnya tampil elegen dalam bahasa pasar senggol *Ngayogyakarta Hadinigrat* disebut *kimpling*. *Kimpling* itu bahasa yang saya ketahui makna dan spiritualitasnya dari kolega saya yang menjadi umatnya *Ngarso Dalem*. Ia bertutur, bahwa *kimpling* itu ada di atas kinclong. Pada intinya, namanya *kimpling* itu kinclong yang bercahaya sehingga tidak sekadar kinclong. Jadi, *kimpling* bukan kinclong bolong, melainkan kinclong yang bercahaya. Kinclong yang demikian saya teorikan dengan istilah "*meta-kinclong*". *Kimpling* benar-benar spektrum cahaya yang menandakan bahwa seseorang itu memiliki kharisma di atas kharisma, dalam dimensi Jawa dinamakan pemegang *awu*, tapi bukan *awu-awu*.

Oleh karena itu, sang caleg niscaya menyerapkan diri menjadi caleg yang *kimpling*, dengan kesaksian jiwa pemegang *awu* yang tidak akan bertindak awu-awu alias *ngapusi*. Yang saya ingin tekankan adalah saya mendorong teman-teman caleg memilih jalan atau *tarekat kimpling* dengan sungguh-sungguh berperilaku layak dipilih. Dengan para caleg *kimpling* maka dipastikan tidak akan ada golput dan MUI tidak perlu capai-capai membuat fatwa haram. Golput menjadi haram bukan karena melanggar hak Tuhan, melainkan tidak adanya caleg *kimpling*. Caleg *kimpling* yang saya patenkan sebagai caleg pengusung cahaya rakyat adalah caleg yang menjaga kapasitas kampanyanya sesuai dengan aturan yang bertata-krama. Perilaku kasat mata yang dapat dilihatnya adalah caleg yang tidak *ngawur* memasang gambarnya.

Gambar mereka tidak dipasang sembarangan sebab gambar ini menandakan jiwa suci sebagaimana dengan kelamin kita. Kelamin kita itu kan suci sehingga Tuhan menempatkannya tersembunyi agar terjaga kesuciannya. Oleh karena itu, lambang caleg *kimpling* bagi saya adalah suci maka jangan menaruh sembarangan dan diedar-edarkan seperti barang dagangan kelas murahan. Jangan menempel di tiang-tiang listrik, tiang telpon, apalagi pepohonan. Meletakkan gambar caleg di fasum-fasum (fasilitas umum) dan pepohonan merupakan tindakan merendahkan derajat *kekimplinganmu*. Apabila fasum digunakan untuk memasang gambar caleg, sudah dapat dipastikan bahwa caleg tersebut

tidaklah caleg *kimpling*, tetapi caleg *mbeling*. *Mbeling* dalam bahasa Jawa *ngoko* adalah perilaku nakal yang melewati batas-batas ketertanggungjawaban.

Anak *mbeling* ... yo anak nakal, meski tidak sampai pada level murtad sosialnya. *Mbeling* dipastikan tidak menguntungkan, kecuali dalam konstalasi kelakar. Caleg *mbeling* adalah caleg yang belum perlu bicara soal visi-misi, dalam kisaran pemasangan gambarnya saja tidak sesuai dengan etika, estetika, apalagi romantika perkotaan. Caleg *mbeling* adalah mereka yang secara sederhana memasang gambar-gambar mereka tanpa aturan dalam titik koordinat perkotaan, yang menggerahkan dan bau yang menggairahkan. Caleg *mbeling* ini jangan ditiru. Apabila mau kampanye dengan terang sederhana saja, bahkan tanpa perlu mencetak gambar besar-besar. Cukuplah teman-teman caleg membuat gambar-gambar kecil ukuran poster-poster untuk anak-anak yang dibagikan ke setiap rumah dengan cara *direct* dikirim dengan tenaga khusus ke rumah atau melalui cara *indirect* menyewa tukang loper Koran, untuk menyelipkan ke dalam tentangan koran ke rumah masing-masing maupun setiap perempatan jalan raya. Praktis. Membuka lapangan kerja. Tidak mengakibatkan kota jorok. Yang pasti ruang publik tidak terlihat sesak gambar. Inilah saatnya bertindak *kimpling* secara ekologis.

### **Pemilu Bukan untuk Mendirikan Pabrik Sampah**

Tahun 2013 hendak berakhir, dan pemilu legislatif segera digelar 2014. Partai Politik dan para calon anggota legislatif dan capres telah muncul ke permukaan. Rakyat menyadari bahwa dalam Pemilu rakyat benar-benar berharkat sebagai “sang penderma suara.” Dalam kosmopolitan sosial yang demikian maka pemilu harus dihayati sebagai media “sedekah suara” dari rakyat kepada parpol dan caleg maupun capres. Rakyat tentu tidak akan keberatan untuk berbondong-bondong ke TPS dalam koridor sedekah. Bukankah kita selalu teringat ucap sakti keagamaan, bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Hal ini jelaslah rakyat yang mencoblos atau mencontreng adalah pemberi sedekah politik yang kedudukannya akan ditinggikan oleh Tuhan dalam kerangka Pemilu. Oleh sebab itu, tidaklah pantas apabila parpol dan caleg

mencoba berani menepuk dada atau meninggikan suara melebihi dari kelapangan dada serta suara rakyat. Soal memasang gambar partai dan caleg merupakan masalah metodologi memperkenalkan diri. Untuk itu, jangan sampai metode mengubah substansinya dengan implikasi terjauh mendestorsi rona keelokan pemilu.

Dalam hal pasang-memasang gambar inilah ada cuatan ekologis yang ekosistemik yang harus dipahami oleh parpol dan caleg. Gambar-gambar partai dan caleg maupun capres itu secara material ternyata banyak terbuat dari plastik ataupun bahan-bahan lain yang sulit terurai secara alamiah. Gambar-gambar ini tentu saja akhirnya akan memberikan beban berat kepada lingkungan untuk menguraikan secara normal. Plastik-plastik gambar partai dan caleg pada posisi pasca pemilu akan menjadi sampah yang mengotori lingkungan hidup Republik ini. Lingkungan hidup yang takdirnya memiliki daya lentur *self-purification* tampaknya akan kelelahan. Sampah plastik yang berasal dari gambar partai dan caleg dapat diprediksi berukuran jutaan meter panjangnya dan juga jutaan kilogram bobotnya. Secara simplistik gambar partai dan caleg serta capres akan mampu “memperban” bumi Pertiwi. Alhasil, usai pesta demokrasi 2014 nanti bisa diduga bumi nusantara seolah masuk ICU dan menjadi pasien yang penuh perban sampah plastik.

Betapa sakit dan menyedihkannya nasib lingkungan hidup negeri ini setelah menjalankan demokrasi sejati (*direct-general-election*). Sampah menumpuk dan menjadi beban lingkungan hidup. Apabila pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tanggal 25 Februari 2009 mencanangkan hari bebas sampah plastik, pasti *stop* plastik itu tidak dapat diindahkan oleh partai dan caleg-capres. Hal ini menandakan, bahwa partai dan caleg tidak dapat mengusung isu lingkungan secara signifikan, tatkala gambarnya berbahan dasar plastik. Parpol dan caleg-capres pada titik demikian merupakan produsen sampah. Hal ini berarti dalam kerangka Pemilu dapat diberlakukan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selanjutnya, penyidikan kasus ini akan menarik dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) maupun penerapan prinsip EPR alias *extended produce responsibility*.

Dengan EPR, kita bisa memberlakukan tanggung jawab produsen atas sampah yang dihasilkan. Inilah solusi konseptual yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan sampah pasca pemilu. Paling tidak, maukah partai dan caleg menarik kembali sampahnya usai pencoblosan (masa tenang) dan mendaur ulangnya sendiri? Langkah ini sangat ekonomis dan membuka lapangan kerja daur ulang sampah bukan? Siapa caleg-capres yang siap menjadi promotor lingkungan dengan tidak memproduksi sampah. Ini adalah titik sederhana untuk memilih siapa calon pemimpin yang pro-lingkungan.

### **Dibutuhkan Pemimpin yang Memiliki *Ecological Intelligence***

*Caleg-capres* tengah memasuki pintu gerbang promosi besar-besaran dengan implikasi kebingungan kolektif bagi para pemilih. Rakyat pada titik tertentu mengalami kegelapan pilihan, akibat dari “kebaikan” semua parpol dan caleg-capres. Mereka semuanya berlogo “kecap nomor satu.” Tampilan mereka dibuat *cool, calm, smart*, dan intelek. Secara teoretis, mereka sedang mengkualifikasikan diri memiliki kapasitas kecerdasan intelektual yang paripurna dengan derajat *emotional intelligence* (kecerdasan emosional) dan *spiritual intelligence* (kecerdasan religius) yang mapan.

Dalam spektrum demikian, rakyat memang sudah sepantasnya berbondong-bondong ke TPS untuk memberikan suara dengan keyakinan, bahwa wakil mereka memang pantas dicontreng. *Ghalibnya*, golput bukan pilihan cerdas mengingat calegnya berpose cerdas-cerdas. Namun, mengapa masih perlu golput? Jawab singkatnya dengan merujuk kolega saya yang akan golput karena caleg-caleg dipersepsi tidak cerdas, tetapi culas bahkan caleg disingkat menjadi *cangkem legrek*. Wah payah ini. Jangan ikut-ikutan ya pembaca.

Saya sendiri berharap TPS akan diantre para pemilih dengan atmosfer spiritual. bahwa pemilu adalah lahan bersedekah bagi rakyat. Saatnya rakyat memperbanyak sedekah. Bukankah sedekah itu menolak bencana seperti ucap suci Nabi Muhammad SAW. Dan bukankah tangan

yang mencoblos atau mencontreng itu ada di atas, dan kedudukan tangan di atas itu mulia? Ya, daripada golput lebih baik *nyoblos*. Amal *nyoblos* masak tidak boleh? He he he....

Ternyata, kecerdasan emosional dan spritual saja tidak cukup mengubah Indonesia lebih baik. Oleh karena itu, para psikolog (lingkungan) sekelas Daniel Goleman menawarkan ukuran baru perilaku seseorang yang dinamakan *ecological intelligence*. Lingkungan harus menjadi parameter sekaligus variabel penentu setiap perilaku seseorang. Orientasi ekologis adalah cermin pembulat kecerdasan emosional dan spritual. Orang yang memiliki *ecological intelligence* akan memposisikan diri pada lingkungan secara ekosistemik yang terintegrasi dengan sikap hidupnya (*ecologists*).

Dalam skala *ecological intelligenc*, maka para caleg-capres yang kita pilih tidak saja yang secara verbal dan narasi menyuarakan kepentingan lingkungan dengan klaim-klaimnya sebagai *environmentalists*. Visi dan misi parpol maupun caleg-capres secara eksplisit memang harus mengutamakan kepentingan lingkungan. Tetapi ada tolok ukur aksi yang praksis untuk menentukan pilihan, apakah parpol dan caleg-capres tersebut memiliki keberpihakan ekologis? Ukuran simplistik yang dapat dilihat kasat mata adalah apakah parpol dan caleg itu membuat tanda-tanda gambar yang terbuat dari bahan daur ulang (bukan plastik-plastik yang merusak ekosistem kalau tidak dimanfaatkan secara 3R)? Apakah mereka suka menanam pohon dan mengajak konstituennya sebagai penjaga lingkungan? Apakah mereka nanti akan mendaur ulang spanduk-spanduk dan alat peraga kampanye mereka sehingga bermanfaat secara ekonomi-ekologi tanpa mendegradasi lingkungan?

Selain itu, berapa luasan ruang terbuka hijau yang dia rawat? Berapa panjang saluran drainase perkotaan yang ia normalisasi? Berapa luas areal konservasi yang telah dia bina? Tentu deret ukur praktis ini dapat ditambah berpuluh-puluh lagi. Apabila hal demikian dilakukan, pantaslah mereka dipilih? Masih ada waktu untuk berubah dan berbenah menjadi promotor lingkungan Indonesia.

Mengertilah, tatkala hutan digunduli dan gunung-gunung ditambang maka air hujan yang semula nikmat berubah menjadi laknat.

Tatkala tata ruang disulap menjadi tata uang maka air hujan yang berkah berubah menjadi prahara. Kata bencana kemudian dimunculkan agar tidak digugat dan Tuhan dihadirkan sebagai saksi atas derita anak negeri. Erosi dan sedimentasi hanyalah produk dari disfungsionalnya lembaga negara yang berwenang dan banjir hanyalah implikasi terdekat yang mesti dituai. Kasus banjir bandang, tanah longsor, tsunami yang terus terjadi adalah potret kebiadaban pemikiran yang dihukumkan dengan retorika belasungkawa kepalsuan.

Kenapa hutan gundul, sementara ada Kementerian Kehutanan. Kenapa tambang terkuras habis, padahal ada Kementerian ESDM. Kenapa ada tanah longsor dikala ada Badan (Balai) Konservasi Sumber Daya Alam. Mengapa lingkungan tercemar dan rusak meski sudah punya Kementerian Lingkungan Hidup. Bagaimana tanggul jebol bisa terjadi disaat ada Kementerian Pekerjaan Umum. Semua lembaga tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi serta anggaran maupun sarana-prasarana yang setiap tahun disodorkan. Adakah mereka berani berkata: "maaf kami gagal menjalankan tugas" meski anggaran telah diserap. Hal itu merupakan sebuah ironi apabila ada bencana sebesar krisis lingkungan itu tidak ada pertanggungjawaban hukum di sebuah negara yang menurut UUD 1945 adalah negara hukum.

Saya khawatir bahwa bencana yang selama ini terjadi justru menjadi agenda kenegaraan. Kini sebagai pengingat sesungguhnya, kami semua takut ocehan J. J Rousseau didengar baik. Oleh karena itu, jangan ada para pemimpin dan penguasa berbisik diam-diam seperti lantunan J. J Rousseau: "Berilah uang dan segera Anda akan hidup senang dengan penuh ketenangan." Renungkanlah, bahwa kata keuangan adalah istilah perbudakan. Apabila suatu ketika Anda mendengar ada seseorang yang mengatakan: "Apa manfaatnya membicarakan pemimpin?" Maka, Anda dapat menyerah bahwa Pemilu telah lenyap". Peringatan J. J Rousseau memang ada yang positif agar penguasa tidak main-main dengan amanat mulia dari rakyat atas nama demokrasi. Seruan satire juga muncul dan jangan sampai itu menginspirasi. W Lippmann menyindir pedas: Kewajiban perdana penguasa adalah terhadap tugasnya dan bukan kepada pemilihnya. Apabila ide demikian yang dominan maka pada

saatnya kartu politik yang dimainkan penguasa itu, demokrasi agaknya hanya seperti nasihat keutamaan belaka. Selamat membenahi Indonesia dengan menjadi promotor pemimpin lingkungan. Akhir kata, saya percaya, pemimpin hasil Pemilu 2014 akan membawa harapan baru bagi kemajuan bangsa. *Green spirit.*